

# KEJAHATAN BERDIMENSI BARU

(Salah satu gelagat perubahan sosial di Indonesia)

Oleh : Saputro Satriyo

## 1. Pendahuluan.

Bahwa berhasilnya pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia.

Yang dimaksud penyelenggara negara antara lain adalah aparatur negara, lembaga publik maupun privat yang berperan serta dalam suatu aktifitas guna terjaminnya kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Untuk tercapainya tujuan negara seperti tercantum dalam konstitusi itu, maka seluruh aparatur pemerintah negara harus dilengkapi dengan pengalaman dan pengetahuan tentang manajemen di dalam berbagai bidang, yaitu bidang politik, sosial, ekonomi, angkatan bersenjata, pendidikan, dan lain-lain sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pembangunan dewasa ini, yang dimaksudkan untuk memajukan masyarakat Indonesia ke arah kehidupan yang lebih baik sejahtera dan makmur melalui strategi pembangunan, selain menitik beratkan sektor ekonomi, memperhitungkan pula aspek-aspek lain yang non ekonomis.

Sementara itu Nasikun (1984) di dalam bukunya, Sistem sosial Indonesia, mengatakan bahwa struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan.

secara vertikal struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan inilah yang dimaksud dengan sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk.

Oleh karena terdapat penggolongan masyarakat Indonesia yang terjadi atas dasar perbedaan suku bangsa, maka segala norma dalam bertingkah laku dan bersikap pun berbeda pula, yaitu masing-masing suku bangsa tersebut mempunyai penghargaan terbaik atas kalangan sendiri.

Adanya perbedaan ini, kendatipun sekarang masyarakat Indonesia bersatu dengan kebhinekaannya, dalam setiap proses sosialnya masih tetap terasakan. Sebagai kenyataan, tampak masih banyak terjadi konflik dalam masyarakat, baik konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku bangsa, ataupun agama, maupun konflik yang disebabkan oleh berbagai lapisan dan faktor kepentingan yang beraneka ragam. Kemajemukan masyarakat Indonesia ini tentu saja besar pengaruhnya terhadap perkembangan, bahkan tidak hanya berpengaruh terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pangan saja, tetapi dapat mempengaruhi keseluruhan pola kepentingan kehidupan.

Guna tercapainya tujuan pembangunan tersebut di atas sangat diperlukan suatu keadaan yang serba menekan dan pengawasan yang ketat. Namun situasi itu tidak lepas pula dari berbagai hambatan, terutama karena banyaknya perubahan struktur sosial atau mungkin karena akibat-akibat perkembangannya. Umpamanya ba-

nyak terjadi korban kejahatan, peristiwa penipuan, korupsi, *white collar crime* (jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam masyarakat atau pejabat-pejabat tinggi), dan sebagainya.

Sudah barang tentu untuk melancarkan dan menstabilkan jalannya roda pembangunan itu, pihak lembaga kriminologi perlu turun tangan sedini mungkin dengan berusaha menekan berbagai efek sampingan dari pembangunan itu. Untuk itu perlu diadakan pendekatan-pendekatan, baik terhadap subyek maupun terhadap obyek pembangunan itu secara sosiologis. Pendekatan ini perlu diterapkan karena akibat-akibat tadi, yang paling segera akan segera merasakannya adalah masyarakat pada umumnya, di samping memang gejala-gejala penyimpangan itu lebih tampak di dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, mungkin akan lebih mudah usaha mengungkapkan berbagai latar belakang dan sebab musabab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat itu.

Hal ini berarti kriminalitas (kejahatan) perlu ditelaah dengan konsep-konsep teoritis, terutama melalui pendekatan-pendekatan sosiologis, di samping ditunjang pula oleh disiplin-disiplin lainnya, seperti psikologi sosial dan antropologi sosial.

Dengan demikian dapat diharapkan, di samping pembangunan relatif dapat dilaksanakan dengan baik, dengan sedikit hambatan-hambatan kejahatan, juga pihak hukum pidana khususnya akan dapat lebih disempurnakan lagi secara ilmiah.

## 2. Pengertian dan fakta kejahatan berdimensi baru.

a. *Kejahatan berdimensi baru.*  
Menurut Jenderal Polisi Drs. M. SANOESI sebagai Kapolri dalam penjelasan pada acara dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, 14 Februari 1990 bahwa:

“Apabila diperhatikan masalah-

masalah keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dari gejala-gejala yang menonjol saja maka kita akan menemukan kasus-kasus kriminalitas dalam tiga golongan yaitu kejahatan konvensional, kejahatan konvensional dengan modus operandi baru, dan kejahatan berdimensi baru.

Kasus-kasus berdimensi baru benar-benar merupakan jenis kejahatan yang baru, seperti *computer crime*, *corporated crime* dan sejenisnya.

Sedangkan menurut Direktur Reserse Polri, pengertian kejahatan dimensi baru adalah :

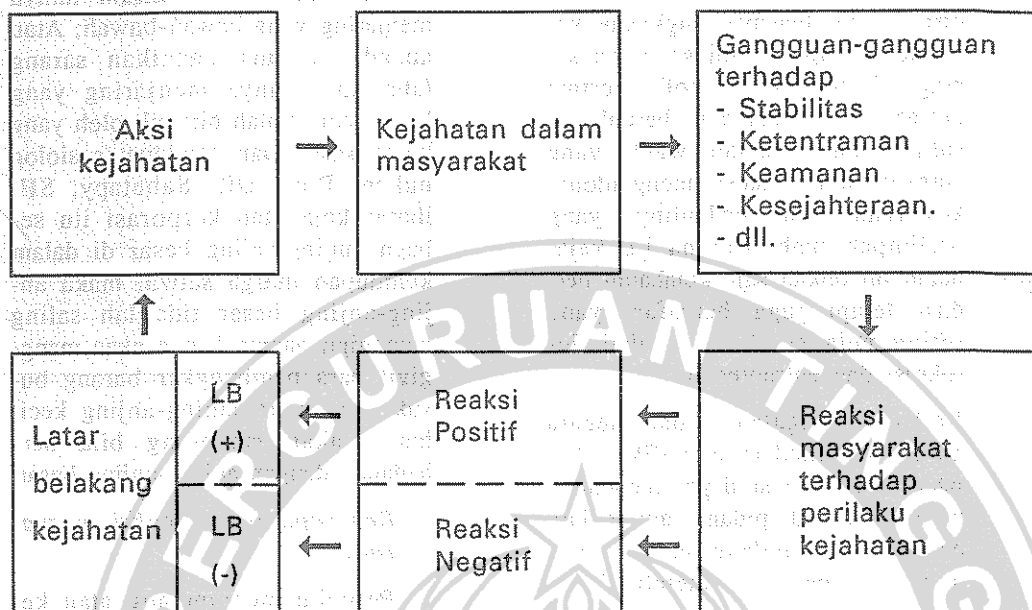
“Kejahatan yang dilakukan oleh kaum intelektual maupun terkemuka (pejabat) atau setidak-tidaknya oleh mereka yang mempunyai keahlian khusus baik secara perorangan (individu), kelompok atau badan hukum dengan menggunakan cara-cara tertentu (pada umumnya menghilangkan jejak dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi) sehingga sulit pembuktiannya, dilakukan dengan kekerasan atau tanpa kekuatan, dengan tidak menegenal batas wilayah dan waktu serta mengarah kepada kepentingan ekonomi dan politik.”

Menurut DR. RUSIDI, MS dalam bukunya “Variabel Penelitian” Pasca Sarjana Unpad Bandung 1990, bahwa dimensi atau indikator itu ialah penjelasan atau ciri-ciri yang menggambarkan variabel itu. jadi kejahatan berdimensi baru yaitu kejahatan dengan ciri-ciri atau variabel dan konsep baru.

b. *Fakta kejahatan berdimensi baru.*

Bentuk kejahatan yang dilakukan sangat variabel dan sering bernilai ekonomis, misalnya pajak, lingkungan hidup, pelanggaran hak konsumen dan korupsi. Sedang kor-

masyarakat.



### 3. Teori Perubahan Sosial.

Perubahan sosial menurut Ibu Astrid Susanto ialah perubahan masyarakat menjadi kemajuan masyarakat dengan suatu pola masyarakat yang sesuai bahkan degradasi martabatnya. Lebih lanjut beliau menekankan proses pembentukan norma baru dan adaptasi terhadap keadaan yang baru, atau proses perubahan sosial pada dasarnya ialah perubahan norma-norma masyarakat.

Prof. H. Yulistira K. Garna, Ph.D. (1992) berpendapat bahwa sebenarnya hampir tak ada masyarakat yang statik, karena kehidupan itu sendiri adalah sejumlah proses gerak maju yang diikuti oleh warga masyarakat. Perubahan sosial merupakan proses kehidupan itu sendiri, yang dapat dimanifestasikan sebagai kehendak menempuh perjalanan kehidupan. Dua sisi yang terkandung dalam perubahan sosial, yaitu kemunduran dan perkembangan dan haruslah dilihat bukan dua sisi yang berlawanan dengan satu sisi kemunduran yang harus dihindarkan. Timbul tenggelamnya sistem sosial budaya suatu masyarakat

adalah karena perubahan fungsi berbagai sistem sosial atau unsur budaya untuk memberi peluang kepada sistem atau unsur lain yang dianggap penting dan baru dalam menjawab proses kehidupan untuk muncul. Sedangkan makna "mundur" dan "maju" itu mengandung makna relatif, paling tidak mengandung peranan dan fungsi tertentu yang timbul tenggelam bagi masyarakat yang mengalaminya.

Perubahan sosial juga diberi arti sebagai "development" atau perkembangan yang merupakan perubahan tertuju kepada kemajuan keadaan dan sikap anggota masyarakat, sehingga akan dinikmati pula oleh individu. Tujuan pembangunan itu adalah pemanfaatan kemajuan teknologi dan ilmu dalam memperbaiki keadaan materi/mental manusia, agar martabat manusia dapat ditingkatkan. Pendapat ini sesuai pula dengan tujuan konstitusi.

Tiga element utama dari teori perubahan sosial yaitu :

- a. Faktor struktural ditinjau dari per-

bannya dapat meliputi konsumen, lingkungan hidup, sistim ekonomi, buruh, dan bahkan pemerintah sendiri. Begitu luasnya jangkauan kejahatan komposisi ini sehingga sering disebut white collar crime (kejahatan berdasar atau berpakaian safari), karena dalam waktu yang singkat mereka dapat mengantongi kekayaan untuk pribadinya yang berlimpah ruah. Karena itu kejahatan ini bukan saja kejahatan berdasar tetapi juga bersafari yang sering pula melibatkan pihak birokrasi dan entrepreneur.

Berbagai pengalaman dari negara maju menunjukkan identifikasi kejahatan komposisi dapat mencakup berbagai tindak pidana, antara lain pelanggaran undang-undang anti monopoli, penipuan melalui komputer, manipulasi pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran harga, produksi barang maupun makanan yang membahayakan konsumen, pelanggaran administratif, pencemaran lingkungan hidup, korupsi, penyuapan, dan kejahatan perburuhan. Salah satu contoh aktual yang masih segar adalah kasus korupsi Golden Key Group (kredit bermasalah di Bapindo), kasus biskuit dan super mie beracun di Palembang dan kasus-kasus manipulasi restitusi pajak yang sedang ramai dibicarakan.

Dalam upaya memberantas kejahatan korporasi tak terkecuali korupsi memang tidaklah mudah. Dalam berbagai penelitian mengenai kejahatan jenis ini selalu akan terbentur tembok bisu mengerikan, belum lagi pihak pers yang diharapkan menjadi salah satu kontrol sosial yang ampuh teras akhir-akhir ini, semakin mempertajam kendala pengungkapan kejahatan korporasi. Benarlah kalau begitu anekdot para pakar hukum dan kriminologi, bahwa hukum hanyalah bagaikan air mengalir, dimana hu-

kum alam mengatakan air selalu mengalir ke bawah, tidak ke atas. Dengan kata lain, hukum hanya menjaring yang bawah-bawah; Atau anekdot hukum bagaikan sarang laba-laba, hanya menjaring yang kecil-kecil malah dirusak oleh yang besar-besar. Dan pendapat sosiolog hukum Prof. DR. Sahetapy, SH, ibarat kejahatan korporasi itu sebagai anjing-anjing besar di dalam kehidupan marga satwa, maka anjing-anjing besar tidaklah saling menggigit namun hanya akan menggigit para pembongkar barang busuk, sementara anjing-anjing kecil hanya akan menolong bila berhadapan dengan anjing-anjing besar.

### *c. Beberapa fakta reaksi masyarakat.*

Perilaku menyimpang atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang (atau lebih) sebenarnya dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan yang melibatkan hubungan antar manusianya, yaitu secara sosiologis. Pendekatan ini dalam situasi kriminalitas dapat diarahkan untuk mencapai sebab-sebab terjadinya suatu tindakan kejahatan dalam masyarakat. Dalam operasi Kepolisian dikenal sebagai hakekat gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yakni faktor-faktor korelatif kriminogen, Police hazard dan Ancaman faktual/ancaman nyata. Baru setelah itu dapat pula dilihat dan diketahui faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan masyarakat memberikan anggapan terhadap kriminalitas. Tentunya secara sosiologis penyebab itu ada hubungannya dengan perkembangan suatu kejahatan dan kerugian masyarakat secara timbal balik.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat siklus aksi dan reaksi di bawah ini, yang menggambarkan kasus-kasus kriminalitas dan reaksi

ubahan sosial antara lain meliputi :

- 1) Fluktuasi pertumbuhan penduduk.
- 2) Penyebaran demografi.
- 3) Kesempatan agresi perang.
- 4) Dapat mengatasi gelombang kontradiksi antara lembaga.

b. Perubahan sosial ditinjau dari mekanisme dan proses termasuk pada pergerakan sosial, konflik dan ako-

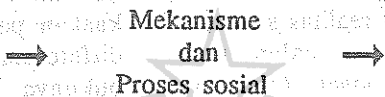
modasi politik serta kegiatan para wira usaha/swasta.

c. Perubahan sosial ditinjau dari segi arah atau tujuan suatu lembaga atau birokrasi maka termasuk perubahan struktur, dampak dari suatu perubahan serta kewajiban birokrasi dalam melayani (services) kepada anggotanya.

Untuk mendapat kejelasannya dikemukakan suatu ragaan sebagai berikut :

### Perubahan sosial

Struktural/aturan sosial/kelembagaan/ birokrasi; ditentukan oleh faktor-faktor penentu kehidupan manusia



Tercapainya arah dan tujuan dengan berbagai akibatnya

Birokrasi dapat dilihat pula sebagai aturan sosial (social order), atau dalam andaian dan makna pelaku sosial (social actor), (GARNA;1994). Dalam kaitan menurut andaian aturan sosial itu maka di-

lihat dari dua perspektif struktural fungsional dan konflik tentang birokrasi dapat dikemukakan dalam daftar berikut, yang memberikan pilihan pola pemikiran bagaimanakah melihat (sistem) birokrasi itu.

### Dua perspektif tentang (sistem) birokrasi.

Struktural-fungsional	Konflik
Setiap birokrasi ialah konfigurasi yang agak kekal	Setiap birokrasi selalu mengalami perubahan
Setiap birokrasi ialah konfigurasi unsur-unsur terintegrasi	Setiap birokrasi selalu mengalami konflik sosial
Setiap unsur dalam sistem birokrasi menyumbang terhadap fungsinya ke seluruh sistem	Setiap unsur dalam birokrasi menyumbang terhadap perubahan
Setiap birokrasi bergantung pada ketertiban satu unsur dengan lainnya	Setiap birokrasi bergantung pada tekanan unsur satu terhadap unsur lainnya
Setiap birokrasi bergantung pada kesepakatan para anggotanya	Setiap birokrasi bergantung pada tekanan sebagai anggota oleh anggota lainnya.

Aturan sosial itu mengekang gerak se-seorang sebagai warga masyarakat, yang malahan mampu menjadi kawalan (control) terhadap segala tindakannya dalam kehidupan sosial; karena ".....social order can mean a member of thing ... the existence of restraint, ... to the control of violence in social life" (Cohen,1975:18).

Oleh karena itu suatu analisa terhadap suatu perubahan sosial untuk kemajuan suatu pembangunan diperlukan :

a. Pengertian dan pemahaman yang komprehensif terhadap perubahan sosial dan tidak dapat diutarakan hanya melalui teori monocausal.

b. Untuk menerangkan sesuatu yang multi causal dari realitas sosial, hal itu sangatlah sukar dalam membentuk suatu konsep (construct) yang formatif.

#### 4. Analisa sosiologi terhadap ke-jabatan berdimensi baru.

##### a. Teori perubahan sosial klasik.

Dalam membahas kaitan teori sosial khususnya perubahan sosial mula-mula berpedoman pada teori perubahan sosial klasik yaitu sesuai pendapat dari ADAM SMITH, KARL MARK, H. SPENCER, E. DURHEIM dan TALCOT PARSONS yang mengamati teori evolusi dan neo evolusi pada aspek :

- Differensiasi sosial
- Integrasi sosial
- Konflik sosial dan
- relasi-relasi sosial serta penekanan pada pemusatan kerja.

Menurut H. Spencer dan Adam Smith, differensiasi sosial merupakan dasar dari prinsip-prinsip perubahan sosial. Sementara Durheim dan Mark menyoroti teori differensiasi sosial (pembagian pekerjaan pada buruh) merupakan inti/sumber dari konflik.

Selanjutnya Karl Mark berpendapat bahwa perubahan sosial itu pada tekanan/aksentuasi :

- Kontradiksi, konflik dan paling akhir adalah dis integrasi yang melahirkan bentuk-bentuk differensiasi sistem sosial ekonomi dan sistem sosial politik.

Lebih lanjut Parson berpendapat bahwa secara komprehensif teori-teori differensiasi sosial diamati pada tekanan :

- Penyesuaian menghadapi perkembangan zaman dengan up-grading kepada anggotanya agar dapat lebih berperan secara spesialis baik terhadap muatan organisasi kelembagannya.

Pendapat Durheim's dalam meneliti mekanisme dan proses perubahan sosial difokuskan pada sebab-sebab struktural dan differensiasi sosial seperti tertuang dalam bukunya "(Problem and differentiation theory today (1992))".

Dan akhirnya Mark Weber yang mengamati sektor tercapainya arah dan tujuan berikut konsekuensinya menekankan pada:

- Kelahiran kembali faktor interest di dalam differensiasi pada level sosio struktural.
- Revitalisasi dari interest dari perubahan sosial.
- Kekuatan budaya merupakan keaktifan melahirkan determinasi perubahan pelembagaan yaitu antara lain berupa :
- Dinamika power of culture, particularry religion in social changes.

Hal itu diutarakan pada buku "Cultural changes and sociological theory" (WUTHNOW : 1992).

##### b. Pada teori-teori modern.

Teori-teori modern tetap memperhatikan pada elemen-elemen dari proses modernisasi yang dapat diidentifikasi yaitu:

- Kepemimpinan struktural.
- Proses dan mekanisme.
- serta jalan keluar menghadapi perubahan sosial.

Sebab modernisasi diartikan dari suatu perkembangan ke sistem produksi dan distribusi barang dan jasa serta pengendalian keuangan sendiri yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor lingkungan strategis (TOORAINÉ : 1992).

Maka adanya modernisasi akan terjadi pula kelas yang tertinggal (kemiskinan) dan kelompok-kelompok konflik dimana hal itu merupakan suatu kelembagaan tersendiri sebagai akibat dari dampak suatu pembangunan. Jarak kaya-miskin semakin melebar, demikian pula yang mapan dengan yang kurang terdidik terjadi gap.

Masyarakat telah berfungsi sebagai pasar dari barang-barang industri. Selanjutnya pasar tadi bersegmentasi sebagai akibat dari kemampuan daya beli dari masing-masing segmen konsumen itu sendiri.

Untuk teori modern pada perubahan sosial ini digunakan teori The Functional-ist approach stresses cultural and the conflict approach stresses structured of domination and processes of conflict.

Jelaslah bahwa kejahatan berdimensi baru itu hendaknya diatasi dengan teori perubahan sosial modern dimana yang dikedepankan adalah teori pendekatan fungsional dan analisa fungsional tentang konflik. (Lewis Coser dalam bukunya : The Functions of conflict : 1956).

#### 5. Penutup.

Demikian tulisan ini, mohon dapat bermanfaat bagi keluarga besar Polri pada umumnya dan para pemerhati perkembangan ilmu Kepolisian pada khususnya.

Semoga Tuhan selalu memberikan Rakhmat dan Taufik kepada kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Taufik ed., 1987, *Pemuda dan Perubahan Sosial*, Jakarta; LP3-ES.
- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung; Remaja Karya CV.
- Dye Thomas R., 1987, *Power & Society* (an introduction to the social sciences), California; Brooks.
- Garna Judistira K., 1992, *Teori-teori Perubahan Sosial*, Bandung; Program Pasca Sarjana Unpad.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Beberapa dasar Ilmu-ilmu sosial*, Bandung; Program Pasca Sarjana Unpad.
- Ghosh Bimal, 1979, *Profiles of social change*, New-Delhi, OF FORD & IBH Publishing Co.
- Koentjaraningrat, 1987, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta; PT. Gramedia.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta; Penerbit Djambatan.
- Nasikun, 1988, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta; CV. Rajawali.
- Rex, John, 1985, *Analisa Sistem Sosial*, Jakarta; PT. Bina Aksara.
- Standy Eitzen D. with Maxine Baca Zim, 1989, *Social Problems*, Bostom; Allyn and Bacon.
- Svalastoga Kaare, 1989, *Diferensiasi Sosial*, Jakarta; Bina Aksara.
- Soepangat Parwati, 1988, *Citra Wanita dalam dunia baru*, Jakarta, PT. Dian Rakyat.

Penulis adalah  
Dosen Sespim Polri.